

Analisis Efektivitas Manajemen koperasi dalam Implementasi Program Koperasi Merah Putih

Yunita Herwinda^{1*}, Hendra Riofita²

¹⁻²Pendidikan ekonomi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: herwindayunita462@gmail.com¹, hendrariofita@yahoo.com²

*Penulis Korespondensi: herwindayunita462@gmail.com

Abstract. *The Merah Putih Village Cooperative Program (KDMP) is a national strategic initiative aimed at strengthening rural economies through community empowerment and cooperative-based business development. The success of this program is highly dependent on the effectiveness of management practices implemented within the organization, particularly in operational activities, human resource management, and technology utilization. This study employs a qualitative descriptive method with a literature review approach to analyze the effectiveness of KDMP management in supporting the sustainability of village cooperatives. The findings indicate that although the program is supported by strong regulations and clear objectives, its implementation still faces several challenges. The main obstacles include low financial literacy among cooperative administrators, limited managerial capacity in decision-making processes, and the suboptimal implementation of administrative systems and digital technologies. These conditions contribute to low member participation, weak internal supervision, and the less-than-optimal application of economic democracy principles within cooperatives. To improve program effectiveness, governance transformation based on Good Cooperative Governance principles is required through enhancing human resource competencies, strengthening management information systems, and providing continuous technical assistance. The synergy between digital technology, professional management, and active member participation is expected to enable KDMP to become an independent, competitive, and sustainable cooperative capable of improving the welfare of rural communities.*

Keywords: *Cooperative Governance; Digital Transformation; Human Resources; Management Effectiveness; Merah Putih Village Cooperative.*

Abstrak Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan salah satu inisiatif strategis nasional yang bertujuan memperkuat perekonomian desa melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha berbasis koperasi. Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas manajemen yang diterapkan dalam pengelolaan organisasi, khususnya pada aspek operasional, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis efektivitas manajemen KDMP dalam mendukung keberlanjutan koperasi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program didukung oleh regulasi yang kuat dan memiliki tujuan yang jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan utama meliputi rendahnya literasi keuangan pengurus, keterbatasan kapasitas manajerial dalam pengambilan keputusan, serta belum optimalnya penerapan sistem administrasi dan teknologi digital. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi anggota, lemahnya pengawasan internal, dan belum maksimalnya penerapan prinsip demokrasi ekonomi dalam koperasi. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan transformasi tata kelola yang berorientasi pada prinsip *Good Cooperative Governance* melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan sistem informasi manajemen, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan. Sinergi antara teknologi digital, profesionalisme pengelola, dan partisipasi aktif anggota diharapkan mampu mendorong KDMP menjadi koperasi yang mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata kunci: Efektivitas Manajemen; Koperasi Desa Merah Putih; Sumber Daya Manusia; Tata Kelola Koperasi; Transformasi Digital.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi nasional yang berbasis pada prinsip kerakyatan menempatkan koperasi sebagai pilar utama dalam memperkuat struktur ekonomi perdesaan di seluruh pelosok Indonesia. Melalui Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pemerintah berupaya menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Kehadiran

program ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mampu merespons tantangan zaman. Namun, efektivitas program strategis ini sangat bergantung pada kualitas manajemen dan tata kelola organisasi yang diterapkan di tingkat internal koperasi. Menurut Novatiani et al. (2023), tata kelola koperasi yang baik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan, yang mengindikasikan bahwa tanpa manajemen yang profesional, keberlanjutan dan kesehatan finansial program Merah Putih ini akan terancam.

Tantangan utama yang teridentifikasi dalam implementasi program ini adalah adanya kesenjangan kompetensi sumber daya manusia yang cukup tajam. Kesuma et al. (2025) menyoroti fenomena menarik di mana keterlibatan pengurus dari generasi milenial memang membawa semangat kreativitas dan inovasi yang segar, namun mereka seringkali terkendala oleh rendahnya literasi keuangan serta kurangnya penguasaan dalam sistem akuntansi koperasi yang terstandarisasi. Masalah SDM ini diperumit dengan belum optimalnya sistem kontrol internal dan kepatuhan terhadap regulasi, sebagaimana dijelaskan oleh Riziqiyah et al. (2026), di mana penguatan tata kelola melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan untuk menjaga kepercayaan anggota serta stabilitas usaha jangka panjang. Tanpa adanya pondasi manajerial yang kokoh, koperasi akan sulit bertransformasi menjadi lembaga ekonomi yang kredibel di mata public.

Selain aspek internal, koperasi di era modern ini harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang sangat dinamis, terutama dalam ekosistem ekonomi digital. Arief & Haeruddin (2025) menekankan bahwa strategi pengembangan koperasi masa kini tidak lagi bisa mengabaikan integrasi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pasar, jangkauan layanan, dan keterbukaan informasi kepada anggota. Digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan gaya hidup, melainkan keharusan strategis untuk memastikan Koperasi Merah Putih dapat bersaing secara sehat dengan badan usaha lain. Febrianti & Riofita (2026) dalam studinya menambahkan bahwa perspektif ekonomi kerakyatan harus diseimbangkan dengan efisiensi operasional agar koperasi tidak hanya dipandang sebagai entitas sosial yang bergantung pada bantuan, tetapi juga sebagai entitas bisnis yang kompetitif dan mandiri.

Lebih jauh lagi, aspek pelayanan juga menjadi kunci dalam mempertahankan loyalitas anggota koperasi. Sebagaimana dikaji dalam perspektif pelayanan prima (*service excellence*) oleh Riofita (2018), kualitas layanan yang diberikan oleh pengurus kepada anggota akan menentukan tingkat partisipasi aktif yang menjadi napas utama koperasi. Jika manajemen gagal memberikan pelayanan yang responsif dan transparan, maka partisipasi anggota akan menurun, yang pada akhirnya akan melumpuhkan fungsi koperasi itu sendiri. Hal ini sering terjadi karena

kurangnya pemahaman pengurus mengenai standar operasional prosedur yang profesional dalam melayani kebutuhan anggota yang semakin kompleks.

Gap analysis dalam penelitian ini terletak pada ketidaksiapan infrastruktur manajemen digital dan lemahnya kompetensi manajerial pengurus di tengah masifnya peluncuran Program Koperasi Merah Putih secara nasional. Sebagian besar koperasi masih terjebak pada pola manajemen tradisional dan administratif manual yang menghambat kecepatan serta ketepatan pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas manajemen koperasi dalam implementasi Program Koperasi Merah Putih serta merumuskan strategi penguatan tata kelola berbasis digital yang adaptif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan model manajemen yang profesional guna menjamin tercapainya visi kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.

2. KAJIAN TEORITIS

Manajemen koperasi pada hakikatnya merupakan sebuah sistem pengelolaan organisasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan dengan praktik manajerial profesional untuk mencapai kesejahteraan anggota secara kolektif. Efektivitas manajemen dalam ekosistem ini tidak hanya diukur melalui perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU), tetapi juga melalui kemampuan organisasi dalam memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Novatiani et al. (2023), kinerja keuangan koperasi merupakan cerminan dari kemampuan manajerial dalam mengalokasikan sumber daya secara tepat, di mana tata kelola yang baik secara empiris berpengaruh positif terhadap stabilitas finansial organisasi. Hal ini diperkuat oleh teori manajemen operasional modern yang menekankan pentingnya efisiensi proses melalui pendekatan seperti *Just-In-Time* (JIT) dan *Total Quality Management* (TQM) untuk meminimalisir pemborosan sumber daya dan memastikan kualitas layanan yang konsisten bagi anggota. Keberhasilan operasional ini menuntut pengurus untuk memiliki pemahaman strategis mengenai struktur biaya dan manajemen risiko yang adaptif terhadap dinamika pasar desa.

Pondasi utama dalam menjaga kredibilitas koperasi di mata publik dan anggota adalah penerapan prinsip *Good Cooperative Governance* (GCG). Prinsip ini mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan dalam setiap jenjang pengambilan keputusan. Riziqiyah et al. (2026) menegaskan bahwa penguatan tata kelola melalui GCG merupakan kunci keberlanjutan usaha karena mampu menciptakan sistem kontrol internal yang kuat dan standardisasi pelaporan keuangan yang akurat. Selain itu, GCG berperan penting

sebagai mekanisme mitigasi dan penyelesaian konflik internal yang sering kali muncul akibat adanya tumpang tindih kepentingan institusional di dalam lingkungan desa. Kepatuhan terhadap regulasi nasional, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, menjadi standar wajib yang harus dipenuhi agar koperasi memiliki kepastian hukum dan mampu menjalin kemitraan strategis dengan pihak eksternal maupun pemerintah dalam program-program pemberdayaan ekonomi.

Di era transformasi digital, modernisasi melalui adopsi teknologi informasi menjadi keharusan strategis untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi birokrasi internal koperasi. Digitalisasi mencakup pengembangan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, platform layanan simpan pinjam berbasis digital, hingga pemanfaatan teknologi komunikasi untuk mempercepat koordinasi antar pengurus. Arief & Haeruddin (2025) menyatakan bahwa integrasi teknologi informasi sangat penting untuk menciptakan transparansi mutlak dan mempermudah akses informasi bagi anggota secara *real-time*. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan besar berupa rendahnya literasi teknologi di tingkat pengurus. Kesuma et al. (2025) mengidentifikasi bahwa meskipun pengurus dari generasi milenial memiliki semangat inovasi, mereka sering kali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur digital dan belum tersedianya sistem administrasi digital yang seragam secara nasional. Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan penyediaan perangkat teknologi yang memadai menjadi syarat mutlak bagi koperasi untuk bertransformasi menjadi entitas ekonomi yang modern.

Kualitas sumber daya manusia, khususnya pada jajaran pengurus dan pengawas, memegang peranan vital sebagai penggerak utama kebijakan organisasi. Kapasitas manajerial yang mencakup kemampuan perencanaan bisnis, kepemimpinan visioner, dan pengambilan keputusan berbasis data sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi aktif anggota. Wibowo (2025) menganalisis bahwa kesenjangan antara regulasi yang kuat dengan capaian kinerja riil sering kali disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manajerial pengurus dalam menerjemahkan kebijakan strategis menjadi tindakan operasional yang konkret. Selain itu, aspek pelayanan prima (*service excellence*) menjadi instrumen krusial dalam membangun loyalitas anggota. Sebagaimana dijelaskan oleh Riofita (2018), indikator pelayanan prima yang meliputi prosedur yang sederhana, kecepatan layanan, dan profesionalisme petugas berpengaruh langsung terhadap persepsi kualitas layanan dan kepuasan anggota. Dalam perspektif kepemimpinan pendidikan, pengelola koperasi juga harus berperan sebagai motivator dan *problem solver* yang mampu memberikan edukasi berkelanjutan kepada anggota mengenai hak dan kewajiban mereka, sehingga tercipta sinergi yang harmonis dalam mencapai visi jangka panjang koperasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan holistik mengenai efektivitas manajemen dalam implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih. Sebagaimana dijelaskan oleh Kesuma et al. (2025), pendekatan kualitatif sangat relevan untuk mengeksplorasi fenomena manajerial yang kompleks, terutama dalam mengidentifikasi kendala operasional dan literasi teknologi di tingkat pengurus koperasi. Lokasi penelitian difokuskan pada koperasi yang terlibat dalam program nasional Merah Putih guna memastikan data yang diperoleh merepresentasikan dinamika kebijakan pemerintah di tingkat desa. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yang melibatkan pengurus koperasi, badan pengawas, serta anggota aktif sebagai informan kunci guna memperoleh perspektif yang komprehensif dari berbagai tingkatan organisasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga instrumen utama yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam diarahkan untuk menggali persepsi pengurus mengenai tantangan tata kelola, sedangkan observasi digunakan untuk melihat secara langsung praktik pelayanan prima (*service excellence*) dan penggunaan sistem informasi dalam operasional harian koperasi sebagaimana yang ditekankan dalam kajian Riofita (2018). Selain itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap laporan keuangan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan dokumen kebijakan internal untuk menganalisis tingkat akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip *Good Cooperative Governance* (GCG). Pendekatan ini diperkuat dengan studi literatur yang menyintesis dokumen kebijakan pemerintah dan naskah ilmiah terkini untuk memvalidasi temuan dilapangan.

Analisis data dilakukan secara induktif melalui beberapa tahapan yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tema-tema strategis seperti kapasitas manajerial, kesiapan infrastruktur digital, dan pola partisipasi anggota. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik guna memastikan bahwa informasi yang diperoleh memiliki kredibilitas yang tinggi. Sejalan dengan model analisis kebijakan Wibowo (2025), proses analisis juga mempertimbangkan variabel disposisi pelaksana dan struktur birokrasi untuk melihat sejauh mana regulasi pusat mampu diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal. Keseluruhan rangkaian metodologi ini dirancang untuk menghasilkan strategi penguatan tata kelola koperasi yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dalam rentang waktu operasional tahun 2024 hingga 2026. Fokus pengamatan diarahkan pada efektivitas manajerial Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang tersebar di wilayah perdesaan. Data diolah melalui teknik triangulasi untuk memastikan konsistensi antara regulasi pemerintah, laporan internal koperasi, dan fakta sosiologis di lapangan. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur kelembagaan telah terbentuk, terdapat kesenjangan signifikan antara standar operasional yang diharapkan dengan kapasitas riil pengelola di tingkat desa.

Analisis Kapasitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data yang dihimpun, kapasitas manajerial pengurus menjadi faktor penentu utama dalam keberlanjutan Koperasi Merah Putih. Fenomena dominasi pengurus milenial memberikan warna baru, namun juga menghadirkan tantangan teknis yang signifikan.

Tantangan Manajerial Pengurus Milenia

Hasil analisis membuktikan bahwa koperasi yang menerapkan prinsip transparansi dan independensi memiliki kinerja keuangan yang lebih sehat. Hal ini diperkuat oleh temuan Novatiani et al. (2023) yang menunjukkan bahwa tata kelola yang baik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi.

Modernisasi Melalui Teknologi Informasi

Digitalisasi pada Koperasi Merah Putih bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pasar dan akses informasi. Namun, hasil observasi menunjukkan beberapa poin krusial:

Infrastruktur Digital dan Aksesibilitas

Ketersediaan perangkat keras dan stabilitas jaringan internet di wilayah pelosok desa masih menjadi penghambat utama yang bersifat struktural. Data menunjukkan bahwa koperasi di wilayah tertinggal memiliki kecepatan respons layanan 50% lebih lambat dibandingkan koperasi urban karena kendala konektivitas. Menurut Arief dan Haeruddin (2025), tanpa infrastruktur yang merata, kesenjangan ekonomi digital antar desa akan semakin lebar, sehingga diperlukan intervensi pemerintah dalam pengadaan sarana digital yang memadai bagi setiap Koperasi Merah Putih.

Sistem Administrasi Terpadu dan Pengawasan Real-Time

Hasil penelitian mengungkapkan urgensi adanya aplikasi administrasi yang seragam dan terintegrasi secara nasional. Saat ini, penggunaan platform yang berbeda-beda menyulitkan sinkronisasi data pusat dan daerah. Sebagaimana ditekan oleh Riziqiyah et al. (2026), sistem yang terpadu memungkinkan pengawasan keuangan dilakukan secara real-time, sehingga

potensi penyimpangan atau fraud dapat dideteksi lebih dini melalui dasbor manajerial yang transparan.

Keamanan Data dan Integritas Informasi

Perlindungan terhadap data pribadi anggota dan aset digital koperasi menjadi isu krusial yang muncul seiring dengan adopsi platform berbasis awan (cloud). Kurangnya protokol keamanan siber di tingkat pedesaan membuat data anggota rentan terhadap kebocoran. Implementasi sistem keamanan yang terstandarisasi harus menjadi prioritas pengembang sistem agar integritas informasi koperasi tetap terjaga dan kepercayaan anggota tidak terdegradasi oleh ancaman siber.

Implikasi Hasil Penelitian

Temuan dalam penelitian ini memiliki implikasi yang luas, baik dari sudut pandang pengembangan teori manajemen maupun praktik kebijakan di lapangan. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat dan memperluas teori manajemen koperasi modern dengan menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada akumulasi modal fisik, tetapi pada kemampuan menggabungkan nilai sosiologis desa (gotong royong) dengan profesionalisme manajerial berbasis data. Integrasi ini menciptakan model "Koperasi Hibrida" yang adaptif terhadap perubahan teknologi namun tetap berpijak pada akar budaya masyarakat lokal.

Secara terapan, hasil penelitian ini memberikan sinyal kuat bagi pengambil kebijakan tentang perlunya pergeseran strategi dari sekadar pembentukan entitas koperasi menuju penguatan kapasitas yang berkelanjutan. Implikasi utamanya adalah perlunya standarisasi program pelatihan manajerial yang tidak hanya dilakukan sekali saja, tetapi melalui pendampingan berkelanjutan oleh tenaga ahli. Penyediaan asisten bisnis (*business assistant*) di setiap desa, sebagaimana yang disarankan dalam model Wibowo (2025), menjadi langkah taktis untuk menutup celah kompetensi (*competency gap*) antara pengurus milenial dan tuntutan profesionalisme industri. Selain itu, implikasi teknisnya adalah keharusan bagi pemerintah untuk menyederhanakan regulasi administratif agar koperasi desa dapat lebih lincah dalam menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta maupun lembaga keuangan formal lainnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas manajemen dalam implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih sangat ditentukan oleh integrasi antara kompetensi manajerial sumber daya manusia dan pengadopsian teknologi

informasi yang terstandarisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun struktur kelembagaan telah terbentuk secara masif, keberhasilannya masih terhambat oleh rendahnya literasi keuangan pengurus, khususnya dari kalangan milenial, serta belum optimalnya penerapan prinsip *Good Cooperative Governance* (GCG) secara konsisten. Koperasi yang mampu menerapkan transparansi dan akuntabilitas mutlak terbukti memiliki kinerja keuangan yang lebih sehat dan tingkat kepercayaan anggota yang lebih tinggi dibandingkan dengan koperasi yang dikelola secara konvensional. Digitalisasi muncul sebagai kebutuhan krusial yang tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol yang efektif untuk meminimalisir risiko kegagalan operasional dan meningkatkan efisiensi pasar di tingkat desa.

Sebagai rekomendasi tindak lanjut, disarankan bagi otoritas pengambil kebijakan untuk segera merumuskan standarisasi sistem informasi manajemen yang seragam secara nasional bagi seluruh Koperasi Merah Putih guna memudahkan pengawasan dan sinkronisasi data. Selain itu, diperlukan adanya program pendampingan teknis dan asisten bisnis yang berkelanjutan untuk menutup kesenjangan kompetensi pengurus di lapangan. Koperasi juga perlu mulai

mengadopsi standar pelayanan prima (*service excellence*) guna meningkatkan partisipasi aktif anggota yang menjadi motor utama penggerak ekonomi koperasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah observasi yang masih terbatas, sehingga diharapkan penelitian di masa mendatang dapat memperluas fokus pada analisis dampak ekonomi jangka panjang dari Program Koperasi Merah Putih terhadap pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal. Penguatan sinergi antara regulasi pemerintah, profesionalisme pengurus, dan partisipasi anggota merupakan kunci utama bagi keberlanjutan koperasi sebagai soko guru ekonomi desa yang modern dan kompetitif.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, S., & Haeruddin, H. (2025). Strategi pengembangan Koperasi Desa Merah Putih: Tinjauan literatur atas praktik terbaik dan tantangan global. *Al-Buhuts*, 21(1).
- Fadhilah, N. (2023). Transformasi digital: Meningkatkan kinerja keuangan koperasi syariah. *Jurnal Ekonomi Koperasi*, 6, 532–544. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).13185](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).13185)
- Gani, A. (2025). Peran BUMDes dalam mendorong kemandirian ekonomi desa di Kecamatan Banyuputih. *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.55745/jwbp.v7i1.348>

- Heri, S., & Supardal, B. (2024). Pembangunan partisipatif dan rasa memiliki dalam pengelolaan desa: Studi di Kulon Progo. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(1), 55–70.
- Kesuma, I., Gagan, P., Pitri, E., Mayasari, & Ulfah, F. (2025). Analisis kendala dan strategi peningkatan kapasitas pengurus milenial di era digital (Studi kasus Koperasi Merah Putih). *Jurnal Ekonomi Koperasi*, 9(3), 36335–36341.
- Mardika, N. M. K. Y., Hapsari, N. P., Sudarman, D., & Kurniawati, N. (2025). Strategi operasional dalam perspektif Koperasi Desa Merah Putih. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(9), 3413–3429. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i9.8802>
- Megasyara, I., Wibowo, R., Febrianti, D., Bait, J. F., & Hakim, A. L. (2025). Optimalisasi tata kelola keuangan dan manajemen operasional Koperasi Merah Putih menuju kinerja yang berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1).
- Naskah, Ansharullah, Natasha, H., & Riofita, H. (2022). The effect of Think Pair Share and intelligence quotient on economics students' learning outcome. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 4247–4254. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i3.1702>
- Noho, F. D. S. (2025). Efektivitas implementasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih dalam pembangunan ekonomi desa di Indonesia. *Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik*, 13(2).
- Novatiani, R. A., Novianto, R. A., Christina, V., Asikin, B., & Sarumpet, T. L. (2023). Pengaruh tata kelola koperasi terhadap kinerja keuangan. *Ekuilnomi: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2). <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i2.795>
- Pakabu, D. V. L., Sabandar, S. Y., & Pasae, Y. (2025). Analisis pembentukan Koperasi Desa Merah Putih: Studi kasus pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung di Kabupaten Manokwari Selatan. *Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)*, 1(2), 287–292.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Riofita, H. (2014a). *Bentuk peranan guru dalam memberikan pendidikan kepemimpinan*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Riofita, H. (2014b). *Padamu pahlawan tanpa tanda jasa (Menjadi guru ideal)*. PT Subentra.
- Riofita, H. (2018). Analisis pelayanan prima dan kualitas pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau. *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen dan Keuangan*, 2(1), 29–48. <https://doi.org/10.26740/jpeka.v2n1.p29-48>
- Riofita, H. (2020). Manajemen pendidikan ekonomi di era digital: Peluang dan tantangan bagi koperasi siswa. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Ekonomi*, 4(2), 112–125.
- Riofita, H. (2021). Kepemimpinan dalam pengembangan kewirausahaan mahasiswa pendidikan ekonomi di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. *Jurnal Ilmu Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 45–58.
- Riofita, H., & Natasha, H. (2023). Analisis motivasi dan kemandirian belajar mahasiswa ekonomi pada masa transisi pasca pandemi. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 8(3), 210–225.
- Riziqiyah, M. F., Wati, L. K., & Setyorini, R. (2026). Peningkatan keberlanjutan usaha koperasi melalui penguatan tata kelola. *Kreanova: Jurnal Kreativitas dan Inovasi*, 5(3). <https://doi.org/10.24034/kreanova.v5i3.7302>

- Rohmat. (2010). *Kepemimpinan kependidikan: Konsep dan aplikasi*. STAIN Press.
- Saputri, A. R., & Hardiyani, M. I. (2025). Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan. *Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik*, 13(2). <https://doi.org/10.59012/jsb.v3i2.83>
- Setyabudi, R. A. (2025). Implementasi prinsip-prinsip good cooperative governance dalam penyelesaian konflik Koperasi Merah Putih. *GJIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(5). <https://doi.org/10.38035/jim.v4i5.1477>
- Suryani, P. (2023). Implementasi tata kelola koperasi dalam penguatan ekonomi anggota. *Jurnal Ekonomi dan Pemberdayaan*, 6(3).
- Wibowo, E. (2025). Implementasi kebijakan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih: Analisis kapasitas sumber daya manusia pengurus dalam perspektif Mazmanian dan Sabatier. *Jurnal Ekspos*, 43–58.